

UNI AFRIKA: MEMBANGUN JEMBATAN PERDAMAIAN DALAM KONFLIK PEMERINTAH ETHIOPIA DAN TIGRAY

Destivia Tri Wijayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: destiviatriwijayanti@gmail.com

Silvi Nur Aini

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: silvinurainiweb@gmail.com

ABSTRAK

Konflik antara pemerintah Ethiopia dan otoritas regional Tigray telah menciptakan ketegangan dan kerusuhan yang signifikan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, peran Uni Afrika (UA) sebagai organisasi regional yang berdedikasi untuk memajukan persatuan dan solidaritas di Afrika memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pemersatu dan penengah yang penting. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki peran UA dalam membangun jembatan perdamaian dalam konflik antara pemerintah Ethiopia dan Tigray. Dalam penelitian ini, akan dianalisis upaya UA dalam mediasi, diplomasi, dan penyelesaian konflik di Tigray. Selain itu, akan dilihat juga apakah UA telah melibatkan diri dalam penyediaan bantuan kemanusiaan dan pemantauan situasi di wilayah tersebut. Dengan mengkaji peran dan tindakan UA, artikel ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang upaya organisasi ini dalam mengatasi konflik yang kompleks dan bermasalah ini, serta menjalin perdamaian yang berkelanjutan di antara pemerintah Ethiopia dan Tigray.

Kata kunci: *Konflik, Mediasi, Peran, Uni Afrika.*

ABSTRACT

The conflict between the Ethiopian government and Tigray regional authorities has created significant tensions and unrest in the region. In this context, the role of the African Union (AU) as a regional organization dedicated to advancing unity and solidarity in Africa has the potential to be an important unifying and mediating force. This article aims to investigate the AU's role in building peace bridges in the conflict between the governments of Ethiopia and Tigray. In this research, AU efforts in mediation, diplomacy and conflict resolution in Tigray will be analyzed. Apart from that, it will also be seen whether the AU has involved itself in providing humanitarian assistance and monitoring the situation in the region. By examining the AU's role and actions, this article hopes to provide better insight into the organization's efforts to address this complex and problematic conflict and forge sustainable peace between the governments of Ethiopia and Tigray.

Keywords: *Conflict, Mediation, Role, African Union.*

PENDAHULUAN

Ethiopia merupakan negara Federasi yang beribu kota di Addis Ababa. Negara yang memiliki nama resmi Republik Demokratik Federal Ethiopia (Federal Democratic Republic of Ethiopia) ini memiliki 9 negara bagian, antara lain: Afar, Tigray, Orokia, Somali, Gambela, Banshangul/Gumuz, Harari, Dire Dawa, dan Addis Ababa. Ethiopia merupakan negara dengan wilayah terbesar kesepuluh di Benua Afrika, dimana masyarakat Ethiopia terdiri dari berbagai macam suku serta budaya yang berbeda-beda di dalamnya. Suku Oromo,

Amhara, dan Tigre merupakan etnis dengan populasi terbesar di Ethiopia, sedangkan Somali, Sidama, Gurage, Wolaita, Afar, Kimbata, Hadiya, dan beberapa etnis lain merupakan suku minoritas yang menyumbang sekitar 28% dari keseluruhan penduduk Ethiopia (Kemenlu, 2018). Evolusi konstelasi keamanan politik dunia tidak lepas dari konflik, baik antarnegara maupun internal yang dikenal dengan perang saudara. Salah satu konflik yang muncul di tahun 2020 ini adalah konflik Tigray yang terjadi di negara Afrika yaitu Ethiopia.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih, Uly Nuzulian Konflik ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan, pemilihan umum, dan dorongan reformasi politik yang melibatkan konflik etnis Tigray. Konflik dimulai ketika pemerintah pusat Perdana Menteri Abiy Ahmed berjuang untuk menghidupkan kembali pemilihan parlemen daerah yang tertunda oleh pandemi virus corona, mengusir pasukan etnis Tigray yang dianggap sebagai pemberontak karena menentang Perdana Menteri Abiy Ahmed. Pada November 2020, serangan militer terhadap pasukan daerah Front Populer Tigray diperintahkan sebagai bagian dari "operasi penegakan hukum" lokal. Sejak November tahun lalu, konflik Tigray dengan cepat meningkat menjadi konflik regional yang melibatkan pasukan Eritrea dan Somalia, serta pasukan khusus Amharik. Namun, Perdana Menteri Abiy dan pemerintah Eritrea menepis tuduhan tersebut, sementara atas desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat, Perdana Menteri Abiy berjanji untuk mengusir pasukan Eritrea paling lambat Maret 2021. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Abiy membantah adanya warga sipil yang terluka dalam bentrokan tersebut.

Konflik dengan cepat meningkat menjadi konflik regional yang melibatkan pemain lain termasuk pasukan khusus Eritrea, Somalia dan Amharik. Menurut berbagai sumber, para pelaku ini diduga terlibat dalam konflik Tigray, meski klaim tersebut ditentang oleh mereka. Unit-unit TPLF memerangi Pasukan Pertahanan Ethiopia (AKHIR), Polisi Federal Ethiopia, polisi regional dan pasukan dari daerah tetangga Amhara dan Afar, serta Pasukan Pertahanan Eritrea (EDF) dan Pasukan Khusus Tigray Pasukan (TSF) (Amnesti Internasional, 2020). Perdana Menteri Abiy mengerahkan milisi untuk memperkuat pasukan di Amhara, selatan Tigray, dan menyapu daerah barat Tigray, menuduh serangan terhadap warga sipil. Pasukan Eritrea kemudian mengalir ke perbatasan

Tigray dari utara untuk berperang bersama pasukan Perdana Menteri Abiy.

Melihat situasi tersebut di atas di Ethiopia, bantuan dari semua pihak tentunya dibutuhkan untuk mencapai hak asasi manusia yang menjadi hak rakyat Ethiopia. Jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dan segera ditangani, maka akan mengarah pada pelanggaran hak dan pelanggaran hak asasi manusia, yang berujung pada masalah keamanan manusia. Dalam konteks ini, organisasi internasional memiliki otoritas paling penting dalam perwujudan hak asasi manusia. organisasi internasional dapat menjadi forum di mana aktor-aktor lain, baik negara, institusi maupun individu, bersaing. Organisasi internasional juga dapat menjadi aktor independen yang berkompetisi untuk dapat menerapkan nilai, norma, dan peraturan yang dimiliki pada komunitas internasional.

Uni Afrika (African Union) adalah organisasi regional untuk wilayah Afrika yang didirikan pada 9 Juli 2002, di Durban, Afrika Selatan (Canadian Mennonite University, 2006). Organisasi regional ini memiliki markas di Addis Ababa, Ethiopia. Sejak awal terbentuknya hingga saat ini Uni Afrika memiliki 53 negara anggota. Sebagai organisasi regional, Uni Afrika memiliki tujuan untuk memperkuat integrasi antar negara-negara Afrika, memperkuat suara Afrika di kancah internasional, menyatukan seluruh negara di kawasan Afrika dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggotanya (African Union. SIA IV hal.2). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini akan berusaha untuk mendeskripsikan Bagaimana peran Uni Afrika dalam upaya memediasi konflik antara pemerintah Ethiopia dan otoritas regional Tigray.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konflik di Tigray

Konflik Tigray adalah konflik bersenjata yang dimulai pada 3 November 2020 di Region Tigray yang merupakan wilayah negara Etiopia, antara pasukan khusus

Region Tigray (yang dipimpin oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray) dan Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia, di aliansi dengan pasukan khusus Region Amhara. Serangan roket telah menyebar ke negara tetangga Eritrea.

Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) adalah sebuah kelompok paramiliter partai politik, dan bekas partai pemerintahan nasionalis etnis Etiopia, yang didirikan pada 18 Februari 1975 di Dedebit, barat laut Tigray, menurut catatan resmi. Dalam kurun waktu 16 tahun, front tersebut berkembang dari selusin anggota menjadi gerakan pembebasan bersenjata paling kuat di Etiopia (Berhe Kahsay (2005). Front tersebut memimpin koalisi gerakan bernama Front Demokrat Revolusioner Rakyat Etiopia dari 1989 sampai 2018 (Paravicini, Giulia; Endeshaw, Dawit, 2020).

konflik Tigray merupakan bentuk luka lama dalam Ethiopia, yang diakibatkan oleh rekam jejak TPLF selama memerintah 30 tahun silam. Konflik akan tetap terjadi jika masih ada ambisi pemerintahan Abiy Ahmed untuk memberi 'hukuman' terhadap TPLF. Konflik ini merupakan bentuk kebencian lama, frustrasi kolektif terhadap TPLF, dan seolah-olah konflik ini mencoba menampilkan bentuk kekerasan struktural. Walaupun di satu sisi, kekecewaan telah diimplementasikan pertama kali lewat serangan mendadak 4 November 2020 oleh TPLF (¹ Pragilaksono, Bimo, 2022). Serangan tersebut kemudian didefinisikan oleh pemerintah sebagai pemberontakan yang mengancam kedaulatan Ethiopia sebagai negara yang merdeka. Pemerintah membutuhkan perhatian lebih terhadap penyusunan ulang aturan, atau dalam istilah dari Abiy Ahmed sebagai 'hukuman' terhadap TPLF, bukan hanya dosa di masa pemerintahan mereka terdahulu, melainkan terhadap tindakan teror mereka dalam negeri. Keterlibatan para aktor di sini pada dasarnya memiliki kesamaan hubungan, yaitu relasi mereka dengan TPLF. Sehingga, hal tersebut menjadi momentum dalam rangka legitimasi pemerintah untuk

kewenangan menyerang TPLF maupun sebagai bantuan akibat pengalaman sejarah.

Konflik tersebut berasal dari upaya Perdana Menteri Abiy Ahmed untuk menjauhkan politik negara dari federalisme etnis, yang memberikan penentuan nasib sendiri kepada kelompok etnis individu yang telah terpinggirkan sebelumnya. Abiy Ahmed membubarkan dan menggabungkan Front Demokrasi Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRDF), sebuah koalisi dari 4 partai berbasis etnis yang telah memerintah Ethiopia selama 30 tahun sebelum dia berkuasa, menjadi satu partai yang disebut Partai Kemakmuran. Namun, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), anggota utama koalisi sebelumnya, menolak untuk bergabung dengan partai baru tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Perselisihan meningkat saat pemilihan umum di Tigray diadakan pada bulan September bertentangan dengan pemerintah federal, yang telah menunda pemilihan nasional karena Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Penyebab langsung dari konflik tersebut adalah dugaan serangan pada tanggal 4 November 2020, yang diluncurkan oleh pasukan keamanan regional Tigray di markas Komando Utara Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia (ENDF) milik Pemerintah Ethiopia. Akar dari krisis ini adalah sistem pemerintahan Ethiopia. Sejak 1994, Ethiopia memiliki sistem federal sehingga kelompok-kelompok etnis berbeda mengontrol 10 wilayah. Partai politik terkuat di Tigray, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), punya andil dalam membentuk sistem ini. TPLF adalah pemimpin dari koalisi empat partai yang memerintah Ethiopia sejak 1991, ketika rezim militer digulingkan. Di bawah koalisi ini, Ethiopia menjadi lebih makmur dan stabil. Namun kekhawatiran akan hak asasi manusia dan level demokrasi di negara tersebut terus bermunculan. Pada akhirnya, ketidakpuasan ini berubah menjadi protes, yang mengarah pada reshuffle pemerintahan yang menobatkan Abiy menjadi perdana Menteri (BBC, 2021). Abiy yang seorang

liberal membentuk partai baru (Partai Kemakmuran), dan memecat para pemimpin pemerintahan dari Tigray yang dituduh melakukan korupsi dan penindasan. Sementara itu, Abiy berhasil menyelesaikan perselisihan wilayah yang berlarut-larut antara Ethiopia dengan negara tetangganya Eritrea, membuatnya diganjar penghargaan Nobel Perdamaian pada 2019. Ini membuat Abiy semakin populer, namun menyebabkan kegelisahan bagi para pengkritiknya di Tigray. Para pemimpin Tigray memandang reformasi yang dilakukan Abiy sebagai usaha untuk memusatkan kekuasaan dan menghancurkan sistem federal Ethiopia. Perselisihan mereka mengemuka pada September. Tigray menentang keputusan pemerintah pusat dan menggelar pemilihan umum regional sendiri. Pemerintah pusat, yang memutuskan menunda pemilu nasional karena pandemi, berkata pemilu regional Tigray ilegal. Perpecahan mulai panas pada Oktober, ketika pemerintah pusat menangguk pendanaan dan memutuskan hubungan dengan Tigray. Pemerintah daerah Tigray mengatakan sikap pemerintah pusat sama saja dengan "mendeklarasikan perang". Lalu dalam apa yang disebut oleh lembaga International Crisis Group sebagai langkah "tiba-tiba dan dapat diprediksi" menciptakan konflik, Abiy berkata Tigray telah melewati "batas". Dia menuduh pasukan bersenjata Tigray menyerang pangkalan militer untuk mencuri senjata. Oleh karena itu, pemerintah federal terpaksa melakukan konfrontasi militer.

Konflik berdarah di wilayah Tigray, Ethiopia, telah berlangsung berbulan-bulan dan. Konflik bersenjata di Tigray menyebabkan hampir 2 juta warga negara Ethiopia sejauh ini dilaporkan meninggalkan Tigray untuk mengungsi, dan puluhan ribu di antaranya mengungsi ke Sudan (Gunawan, 2021). Perang sipil di Ethiopia mulai berkobar pada November 2020, ketika Pasukan Pemberontak Tigray menyerang kamp-kamp militer tentara federal Ethiopia. Sejak saat itu, Pemerintah Federal Ethiopia berupaya untuk menekan

agresi Pasukan Tigray yang berupaya untuk mengambil alih Ethiopia. Meskipun konflik ini hanya menargetkan kamp militer di beberapa wilayah, nyatanya ratusan warga sipil dinyatakan tewas akibat konflik bersenjata di negara terpadat kedua di Afrika tersebut. Dampak lain dari konflik ini adalah jutaan orang terlantar dan ratusan ribu orang di ambang kelaparan di negara terpadat kedua di Afrika, yang mengacaukan wilayah Tanduk Afrika yang lebih luas. Perang telah menambah masalah serius lainnya di Ethiopia termasuk kekeringan, yang terburuk dalam empat dekade, yang telah menyebabkan krisis pangan dan merusak ekonomi. Konflik ini menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut dan bisa mendorong pengungsian massal di negara terpadat kedua di Afrika itu, yang memiliki populasi 110 juta orang. Sebagai sekutu dekat AS, Ethiopia dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan perdamaian di wilayah Tanduk Afrika yang rentan tersebut. Namun hal ini bisa dihancurkan oleh perang yang meluas ke Eritrea, dan fakta sekitar 96.000 pengungsi Eritrea yang tinggal di Tigray bisa mengungsi lagi. Dengan banyaknya pengungsi Ethiopia yang melarikan diri ke Sudan, yang telah menampung 1,1 juta pengungsi, ini berisiko mengganggu kestabilan transisi yang sedang dilaluinya, di samping krisis ekonomi yang berkepanjangan (Pragilaksono, Bimo, 2020). Ethiopia juga menjalankan misi penjaga perdamaian yang sukses di negara tetangga Somalia, tetapi itu sekarang terancam karena kekacauan internal.

2. Uni Afrika

Uni Afrika adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari 55 anggota negara di Afrika. Sebagai organisasi regional, Uni Afrika memiliki tujuan untuk memperkuat integrasi antar negara Afrika, memperkuat suara Afrika di kancah internasional, serta menyatukan seluruh negara di kawasan Afrika untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Selain tujuan Uni Afrika juga memiliki prinsip meningkatkan rasa

persaudaraan, persatuan dan solidaritas antar warga negara agar lebih baik. Memaklumi dan menerima setiap perbedaan untuk mencapai kemerdekaan yang baik. Penyelesaian perdamaian yang ada di kawasan Afrika dengan cara yang tepat. Larangan melakukan tindak kekerasan baik yang bersenjata maupun non senjata. Menjaga keamanan dan perdamaian agar masyarakat di kawasan Afrika dapat hidup dengan aman dan tentram (Kaba Amadu Jacky, 2010) Demi terwujudnya sebuah penyelesaian dari konflik, Uni Afrika merupakan sebuah Organisasi Internasional merasa tergerak untuk terjun langsung dalam misi penyelesaian konflik-konflik yang sedang terjadi di negara anggota. Hal ini sesuai dengan tujuan dan juga prinsip yang dimiliki oleh Uni Afrika yang mana tujuan serta prinsip tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam *Constructive act of the African Union* pasal 4 poin (h) yang menyebutkan bahwa Uni Afrika berhak untuk melakukan campur tangan dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi di negara anggotanya. Isi dari *Constitutive act of the African Union* Pasal 4 poin (h) tersebut adalah: "*The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity*". Upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Afrika diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Uni Afrika berperan sebagai fasilitator perundingan damai, (2) Uni Afrika berperan sebagai mediator perundingan damai, (3) Uni Afrika berperan sebagai rekonsiliator kesepakatan gencatan senjata. Dalam hubungan luar negerinya masing-masing negara anggota Uni Afrika mengoordinasikan kebijakan luar negeri melalui badan ini, selain menjalankan hubungan internasional mereka sendiri berdasarkan negara bagian. Uni Afrika mewakili kepentingan masyarakat Afrika secara luas di Organisasi antar pemerintah (IGO), misalnya adalah pengamat tetap di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik Uni Afrika dan Perserikatan

Bangsa-Bangsa bekerja sama untuk menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama di berbagai bidang. Misi Uni Afrika untuk PBB bercita-cita untuk menjadi jembatan antara kedua organisasi tersebut (Sari, Venisa Yunita, Nurfitri Nugrahaningsih, and Uilly Nuzulian, 2022)

3. Peran Uni Afrika dalam Resolusi Konflik di Ethiopia dan Tigray Penyampaian Pernyataan Keprihatinan

Dalam konteks konflik di Tigray, Uni Afrika telah menyampaikan pernyataan keprihatinan atas eskalasi kekerasan dan situasi kemanusiaan yang memburuk. Pernyataan ini bertujuan untuk mengekspresikan kekhawatiran Uni Afrika terhadap konflik tersebut dan meminta semua pihak yang terlibat untuk menghentikan kekerasan serta mencari solusi damai.

Uni Afrika mengecam semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam konflik di Tigray dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta melindungi warga sipil. Memanggil semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghentikan pertempuran, menahan diri dari tindakan yang memperburuk situasi, dan memberikan prioritas pada dialog damai.

Uni Afrika Berperan Sebagai Mediator

Pada awalnya, kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan diperkirakan alot karena para pihak bersikeras pada posisi masing-masing. Uni Afrika, yang menjadi mediator perundingan damai, pada awalnya hanya akan memberikan keterangan pers soal situasi perundingan yang telah dimulai sejak pekan lalu di Pretoria, Afrika Selatan.

Uni Afrika memiliki peran yang cukup besar dalam upaya penyelesaian konflik di Ethiopia ini yakni bertindak sebagai mediator atau aktor pihak ketiga diantara kedua belah pihak yang sedang terlibat konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik diantaranya adalah Pemerintah Ethiopia dan Pasukan Pemberontak Tigray. Dalam memainkan perannya disini sebagai

mediator, Uni Afrika harus mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat konflik yang bertujuan supaya menemukan jalan keluar dari konflik tersebut.

Pasukan Pemberontak Tigray dan Pemerintah Federal Ethiopia menggelar perundingan dengan tujuan untuk mengakhiri perang sipil yang telah berlangsung selama hampir dua tahun. Mediasi damai tersebut di pimpin oleh Uni Afrika di Afrika Selatan hingga 30 Oktober 2022. Pemerintah Afrika Selatan setuju untuk menjadi tuan rumah untuk mediasi konflik tersebut. Perundingan seperti itu sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Afrika Selatan tentang benua yang aman dan bebas konflik (Indonesia defense, 2022).

Uni Afrika menjadi mediator untuk pertama kalinya sejak konflik antara pemerintah Ethiopia dan Tigray terjadi. Perundingan tersebut diharapkan dapat menghentikan perang sipil yang telah menewaskan ratusan korban di Ethiopia. Uni Afrika memberikan dukungan kepada pihak-pihak terkait atas komitmen dalam kaitannya mencari solusi damai.

Perundingan damai akan dimulai hanya beberapa hari setelah tentara Ethiopia dan sekutunya merebut tiga kota besar di Tigray, satu di barat laut dan dua di selatan ibukota regional Mekelle. Tigray TV, kantor media yang dikendalikan oleh otoritas Tigray, Jumat mengatakan pasukan Tigray telah membebaskan lebih dari 9.000 tahanan perang Eritrea dan Ethiopia, termasuk 500 perempuan. Stasiun televisi tersebut melaporkan bahwa para tawanan perang dibebaskan karena yang menjadi musuh Tigray adalah pemerintah Ethiopia, bukan tentara garis depan yang mereka katakan dipaksa untuk berperang (VOA. 2022).

Strategi dan pendekatan yang diambil oleh Uni Afrika dalam menangani konflik pemerintah Ethiopia dan Tigray adalah dengan cara perundingan damai yang dinaungi oleh Uni Afrika ini dilakukan menyusul komitmen sebelumnya dari Pasukan Tigray dan Pemerintah Ethiopia untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah menuju perdamaian. Uni Afrika pada

awalnya sebagai organisasi yang mengambil langkah untuk mengutus tiga orang yaitu mantan presiden Mozambik, Joaquim Chissano, mantan presiden Liberia, Ellen Jhonson-Sirlead dan mantan presiden Afrika Selatan Kgalema Motlanthe (Mahdi Muhammad, 2020). Tugas utama utusan khusus ini adalah untuk mengajak seluruh pihak yang berkonflik agar segera mengakhiri pertempuran, menciptakan kondisi yang tepat agar ada dialog yang inklusif guna menyelesaikan seluruh permasalahan penyebab konflik, dan mengembalikan perdamaian serta stabilitas di Ethiopia. Himbuan Uni Afrika agar semua pihak untuk akhirnya terlibat dalam dialog dan kompromi. Langkah tersebut juga merupakan perwujudan dari tujuan didirikannya Uni Afrika serta merangkul dan melibatkan tokoh-tokoh negara yang ada di Afrika untuk terjun dan terlibat dalam penyelesaian konflik di Ethiopia. Namun pemerintah Ethiopia berulang kali mengatakan pihaknya tidak akan bernegosiasi dengan Barisan Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), partai politik yang memimpin pemberontakan. Kerangka kerja hukum dan normatif yang mendukung tindakan Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik.

Strategi Global Uni Afrika menggabungkan tindakan keamanan, pembangunan, dan diplomatik untuk mendukung tujuan bersama. Uni Afrika memastikan pendekatan terpadu terhadap konflik dan krisis dengan menggunakan kotak alat komprehensif yang tersedia di Uni Afrika di semua tahap konflik, mulai dari pencegahan hingga manajemen krisis untuk berkontribusi pada perdamaian yang berkelanjutan. Uni Afrika berusaha untuk memberikan stabilisasi dan perdamaian, dalam koordinasi yang erat dengan Negara anggota, menggabungkan pencegahan konflik, mediasi dan pembangunan perdamaian dengan cara yang efektif. Uni Afrika memastikan bahwa keterlibatan Uni Afrika sensitif terhadap konflik dan didasarkan pada analisis yang tepat. Sehubungan dengan Pencegahan Konflik,

Uni Afrika bertujuan untuk mengatasi risiko struktural konflik kekerasan melalui semua kebijakan, alat, dan instrumen yang relevan secara tepat waktu dan berurutan.

4. Akhir Konflik Antara Pemerintah Ethiopia dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (FPRT)

Pemerintah Ethiopia dan sekutunya, termasuk militer Eritrea, telah memerangi pasukan Tigray di utara negara itu sejak akhir 2020. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang, membuat jutaan orang terlantar dan ratusan ribu orang di ambang kelaparan. Kedua belah pihak telah berkomitmen untuk melakukan pembicaraan, tetapi tertunda karena alasan logistik. Perundingan damai akan dimulai hanya beberapa hari setelah tentara Ethiopia dan sekutunya merebut tiga kota besar di Tigray, satu di barat laut dan dua di selatan ibukota regional Mekelle. Pasukan Tigray telah membebaskan lebih dari 9.000 tahanan perang Eritrea dan Ethiopia, termasuk 500 perempuan. Stasiun televisi tersebut melaporkan bahwa para tawanan perang dibebaskan karena yang menjadi musuh Tigray adalah pemerintah Ethiopia, bukan tentara garis depan yang mereka katakan dipaksa untuk berperang.

Pasukan Pemberontak Tigray dan Pemerintah Federal Ethiopia menggelar perundingan dengan tujuan untuk mengakhiri perang sipil yang telah berlangsung selama hampir dua tahun. Mediasi damai ini di pimpin oleh Uni Afrika di Afrika Selatan hingga 30 Oktober 2022. Perundingan damai yang dinaungi oleh Uni Afrika ini dilakukan menyusul komitmen sebelumnya dari Pasukan Tigray dan Pemerintah Ethiopia untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah menuju perdamaian. Pasukan pemerintah Etiopia telah mencapai gencatan senjata yang dimediasi oleh Uni Afrika dengan pasukan pemberontak Tigray, setelah konflik dua tahun. Perantara khusus Uni Afrika Olusegun Obasanjo mengatakan di Pretoria, pihak-pihak yang bertikai juga telah menyetujui "pelucutan senjata yang sistematis, tertib, lancar dan

terkoordinasi. Gencatan senjata juga termasuk menyetujui "pemulihan layanan" dan "akses tanpa hambatan ke pasokan kemanusiaan. Perdana Menteri Etiopia Abiy Ahmed menegaskan komitmen pemerintahnya untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. Dia menyambut baik gencatan senjata, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hasil dari pembicaraan damai. Seorang perwakilan Tigray mengatakan dalam pernyataan pers ketika gencatan senjata diumumkan bahwa kesepakatan itu harus segera dilaksanakan. Perwakilan utama Getachew Reda mengakui "konsesi" telah tercapai, yang menurutnya diperlukan untuk membangun kepercayaan.

Konflik selama 17 bulan itu memicu bencana kemanusiaan berkepanjangan, di mana 400.000 warga Tigray terusir ke kamp-kamp pengungsi. Januari silam, PBB melaporkan hampir 40 persen penduduk Etiopia, yang berjumlah enam juta orang, mengalami "kelangkaan pangan akut." Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya jumlah bahan bakar yang membatasi pengiriman bahan pangan dan obat-obatan. PBB menyebutkan, petugas kemanusiaan sampai harus mengirimkan bantuan dengan berjalan kaki.

KESIMPULAN

Dalam tulisan ini, telah dilakukan analisis terhadap peran Uni Afrika (UA) dalam upaya membangun jembatan perdamaian dalam konflik antara pemerintah Ethiopia dan otoritas regional Tigray. Melalui penelitian ini, kami mengidentifikasi beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan. UA memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan pemersatu dan penengah dalam konflik tersebut. Sebagai organisasi regional yang berkomitmen untuk memajukan persatuan dan solidaritas di Afrika, UA dapat memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. UA telah mengambil beberapa langkah dalam upaya membangun jembatan perdamaian di antara

pemerintah Ethiopia dan Tigray. UA telah terlibat dalam mediasi, diplomasi, dan penyelesaian konflik. Meskipun ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh UA dalam peran mereka, penting untuk diakui bahwa upaya UA dalam membangun jembatan perdamaian memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian konflik dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Ethiopia dan Tigray.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC 29 June 2021 Ethiopia's Tigray war: The short, medium and long story. Diakses tanggal 28 juni 2023.
- Berhe, Kalsay (2005). Ethiopia: Democratization and Unity: The Role of the Tigray People's Liberation Front. Münster.
- EN Council conclusions on conflict prevention Jun 20, 2011 Jun 20, 2011
- Gunawan, S. M. (2021). Pemberontak Tigray Hancurkan 7.000 Lembaga Pendidikan, 1,4 Juta Siswa di Ethiopia Putus Sekolah.
- Indonesia Defense. 2022. Uni Afrika Mediasi Perdamaian Perang Sipil Ethiopia. Diakses di laman <https://indonesiadefense.com/uni-afrika-mediiasi-perdamaian-perang-sipil-ethiopia/>. Pada Senin, 3 Juli 2023
- Kaba, Amadu Jacky. "Africa's Development in the Era of Barack Obama: The Role of the African Union." *Journal of Pan African Studies* 2, no. 8 (2009).
- Muhhamd, Mahdi. 2020. Tiga Utusan Uni Afrika Coba Tengahi Konflik Tigray . Diaksesdi Laman <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/11/28/tiga-utusan-uni-afrika-coba-tengahi-konflik-tigray>. Pada Senin, 3 Juli 2023
- Paravicini, Giulia; Endeshaw, Dawit (4 November 2020). "Ethiopia sends army into Tigray region, heavy fighting reported". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 November 2020. Diakses tanggal 4 November 2020.
- Pragilaksono, Bimo. "Konflik Berkepanjangan Ethiopia: Sebuah Penghampiran Mediasi Ethiopia-Tigray." *Jurnal Sentris* 3, no. 1 (2022): 16-26.
- Pragilaksono, Bimo. "Konflik Berkepanjangan Ethiopia: Sebuah Penghampiran Mediasi Ethiopia-Tigray." *Jurnal Sentris* 3, no. 1 (2022): 16-26.
- Sari, Venisa Yunita, Nurfitri Nugrahaningsih, and Uly Nuzulian. "Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray." *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (2022): 154-180.
- VOA. 2022. Uni Afrika: Pembicaraan Damai Ethiopia Dimulai Senin. Diakses di laman <https://www.voaindonesia.com/a/uni-afrika-pembicaraan-damai-ethiopia-dimulai-senin/6800377.html>. Pada Senin, 3 Juli 2023